

PENDIDIKAN PKN

di SD



Juwita Tindaon, M.Pd.

PENDIDIKAN PKN DI SD

PENDIDIKAN PKN DI SD

Juwita Tindaon, M.Pd.



PENDIDIKAN PKN DI SD

Penulis:
Juwita Tindaon, M.Pd.

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : April 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-853-1

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Pendidikan PKN di SD sesuai yang ditargetka.

Buku dengan judul Pendidikan PKN di SD ini berisikan mulai dari paradigm dan tujuan utama pembelajaran PKN di SD, Kajian Standar Isi Pembelajaran PKN di SD, sampai dengan Strategi dan Model Pembelajaran PKN di SD. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

April 2024, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PARADIGMA DAN TUJUAN UTAMA PEMBELAJARAN PKN DI SD	1
A. Hakikat Pembelajaran PKn	1
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran PKn	3
C. Tujuan Pembelajaran PKn di SD	6
 BAB II PKN SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER	 11
A. Landasan PKn	11
B. Karakter Bangsa Indonesia	13
C. PKn Sebagai Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia	19
 BAB III KAJIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN PKN RUANG LINGKUP KURIKULUM 2013	 25
A. Fungsi Dan Tujuan Pkn Di SD Kurikulum 2013	25
B. Konsep Dasar Kurikulum 2013	27
C. Landasan Pengembangan Kurikulum	30
D. Keunggulan Kurikulum 2013	31
E. Kelemahan Kurikulum 2013	34
 BAB IV KAJIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN PKN RUANG LINGKUP KURIKULUM MERDEKA	 38
A. Kurikulum Merdeka	38
B. Konsep Kurikulum Merdeka	39
C. Kajian Standar Isi PKn Kurikulum Merdeka	45

BAB V STRATEGI, PEDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN PKN DI SD	47
A. Pengertian Strategi Pembelajaran	47
B. Tujuan dan manfaat strategi pembelajaran	49
C. Konsep Dasar Strategi Pembelajaran	53
D. Kriteria Pemilihan Strategi Pembelajaran	53
E. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran	54
F. Hakikat Model dan Pembelajaran	59
G. Model-Model Pembelajaran	61
 BAB VI MEDIA PEMBELAJARAN PKN BERBASIS TIK DI SD	 79
A. Pengertian Media Pembelajaran	79
B. Nilai dan Manfaat Media Pembelajaran	80
C. Jenis-Jenis Media Pembelajaran Berbasis Teknologi	83
D. Pemanfaatan Media Berbasis TIK pada Pendidikan Kewaragnegaraan	87
 BAB VII PROGRAM SEKOLAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN BELAJAR PKN	 89
A. Definisi Program Sekolah	89
B. Macam-macam Program Sekolah	90
C. Sarana dan Prasarana Program Sekolah	90
D. Program Sekolah atau Ekstrakurikuler yang dapat mendukung KBM PKn di SD	93
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PARADIGMA DAN TUJUAN UTAMA PEMBELAJARAN PKN DI SD

A. Hakikat Pembelajaran PKN

Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan (PKN) merupakan pendidikan yang di ajarkan mulai dari sejak SD sampai kejenjang Perguruan Tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dilaksanakan untuk mengembangkan potensi intelektual peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama Pancasila, berakhlak mulia, berpenampilan baik, dan sehat jasmani. terinformasi dengan baik. , mampu berkreasi, mandiri, mampu menjadi warga negara yang demokratis dan mampu bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan di kenal juga sebagai *Civic Education*, Winataputra dan Budimansyah (2007:4) mengukutip pendapat Kerr bahwa *Citizenship Education or Civic Education* didefinisikan sebagai berikut: “Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and in particular , the role of education (trough schooling, teaching and learning) in that preparatory process”.

Sedangkan Cogan (1999:4) mengartikan Civic Education sebagai “The foundational course work in school designed to prepare young citizens for an

active role in their communities in their adult lives”, yang di artikan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan generasi bangsa, agar menjadi manusia yang dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Pendidikan kewarganegaraan tak ubahnya merupakan pendidikan yang membentuk siswa sesuai dengan pancasila sebagai dasar negara republik indonesia.

Menurut Zamroni (Tim ICCE,2005:7) mengemukakan bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah: Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan menurut dalam Depdiknas (2006:49), pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Somantri (2001:154) menyatakan bahwa: Peranan Pembelajaran PendidikanPKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan

dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Berdasarkan padang yang tela dikemukakan pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda bangsa Indonesia, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk anak-anak Indonesia dapat meningkatkan akhlaknya. Namun orang tua dan pemerintah juga harus ikut membantu mendukung peningkatan moral anak Indonesia.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran PKn

Mengingat masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, maka pendidikan kewarganegaraan perlu mendapat perhatian khusus di sekolah-sekolah, terutama di sekolah dasar, dimana anak baru menerima pendidikan kewarganegaraan dalam diri orang yang dapat bernegara dan memahami berbagai hal, nilai-nilai tersebut mengandung nilai sosial. Pentingnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memberikan landasan yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar, namun kenyataannya kesadaran bernegara dan moral di Indonesia sangat memprihatinkan, dan

hal ini biasa terjadi pada anak sekolah yang mengikuti kursus kewarganegaraan. Adapun beberapa unsur yang terkait dengan pengembangan PKn, antara lain (Somantri, 2001:158):

- a. Hubungan pengetahuan intraseptif (*intraceptive knowledge*) dengan pengetahuan ekstraseptif (*extraceptive knowledge*) atau antara agama dan ilmu.
- b. Kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional.
- c. Disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendidikan.
- d. Disiplin ilmu-ilmu social, khususnya ide fundamental Ilmu Kewarganegaraan.
- e. Dokumen negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 dan perundangan Negara serta sejarah perjuangan bangsa.
- f. Kegiatan dasar manusia
- g. Pengertian pendidikan IPS

Ketujuh unsur inilah yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan kewarganegaraan. Mengapa perkembangan pendidikan politik akan berdampak melihat isu-isu kewarganegaraan sebagai salah satu tujuan pelajaran IPS. Oleh karena itu, kewarganegaraan merupakan salah satu tujuan pendidikan sosial yang mengedepankan nilai-nilai yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan patriotik.

Beberapa faktor yang lebih menjelaskan mengenai Pendidikan kewarganegaraan antara lain (Somantri, 2001:161):

- 1) PKn merupakan bagian atau salah satu tujuan pendidikan IPS, yaitu bahan pendidikan diorganisasikan secara terpadu dan berbagai disiplin ilmu sosial, Humaniora, dokumen negara, terutama bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela negara.
- 2) PKn adalah seleksi dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, pancasila, UUD 1945 dan dokumen negara lainnya yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.
- 3) PKn dikembangkan secara ilmiah dan psikologis baik untuk tingkat jurusan PMPKN dan FPIPS maupun dikembangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi.
- 4) Dalam mengembangkan dan melaksanakan PKn, kita harus berfikir secara integratif, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan antara hubungan pengetahuan intraseptif (agama, nilai – nilai) dengan pengetahuan ekstaseptif (ilmu), kebudayaan Indonesia, tujuan pendidikan nasional, pancasila, UUD 1945, GBN, filsafat pendidikan, psikologis pendidikan, pengembangan kurikulum disiplin, ilmu – ilmu sosial dan humaniora, kemudian dibuat program pendidikannya yang terdiri atas unsur : (i) tujuan pendidikan, (ii) bahan pendidikan, (iii) metode pendidikan, (iv) evaluasi.

- 5) Pkn menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan berpikir aktif warga negara, yang baik (*good citizen*) dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (*civics affairs*).
- 6) Dalam keputusan asing PKn sering disebut *civic education*, yang salah satu batasnya ialah “seluruh kegiatan sekolah, rumah dan masyarakat dan dapat menumbuhkan demokrasi”.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kebijakan kewarganegaraan memegang peranan penting karena IPS menyadarkan siswa akan politik, sikap dasar demokrasi dan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Kewarganegaraan sebagai nilai pendidikan terpilih dan pengembangan aspek efektif, yang akan terlihat dari tingkah lakunya.

C. Tujuan Pembelajaran PKn di SD

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang penting di sekolah dasar, tujuan pembelajaran PKN dalam Depdiknas (2006) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berfikir kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan Rosyada, dkk (2005) mengungkapkan tujuan PKn, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik ditingkat lokal, nasional, regional, dan global;
2. Menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis;
3. Menghasilkan masyarakat yang berfikiran komprehensif, analitis, kritis, dan bertindak demokratis;
4. Mengembangkan kultur demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan;
5. Mampu membentuk mahasiswa menjadi good and responsible citizen (warga negara yang baik dan bertanggungjawab) melalui penanaman moral dan keterampilan

(social skills) sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan seperti toleransi, perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, kesadaran hukum dan tertib sosial, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan demokratisasi dalam berbagai lapangan kehidupan, dan menghargai kearifan lokal (local wisdom).

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran PKn secara umum, hal ini adalah tentang mempersiapkan generasi manusia yang lebih baik dan lebih baik, baik secara lokal, regional, dan global. Miliki akhlak yang baik berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa untuk meningkatkan sikap keagamaan agar selaras dengan kepribadian yang baik. Ia mampu lebih mengembangkan ilmunya berdasarkan pendekatan ilmiah. PKn juga mengetahui cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik dan sesuai kebutuhan. Dan dia bisa dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya terhadap negara. Bunyamin M dan Sapriya (2005:30) menjelaskan tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara yang baik (*to be good citizens*) yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civics responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, sekolah khususnya pada tingkat dasar dan menengah, hendaknya dikembangkan sebagai lingkungan sosial atau

struktur pendidikan yang mendorong atau menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan berbagai karakteristik individu siswa. Kualitas individu ini sangat penting bagi bangsa. Angka berfungsi sebagai cadangan untuk masa depan. Diharapkan siswa dapat berperilaku sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu, siswa juga belajar berpikir kritis untuk mendekati masalah dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Oleh karena itu, sekolah harus berkembang sebagai bagian integral dari masyarakat, sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hidupnya, yang mampu memberikan teladan, membentuk kemauan dan mengembangkan kreativitasnya dalam proses pembelajaran yang demokratis, sehingga sekolah lambat laun menjadi masyarakat yang budayanya didasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab serta keselarasan dalam menyelenggarakan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan beradab. Dalam konteks ini, pembelajaran PKN hendaknya menjadi sarana pendidikan untuk mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sadar akan pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam proses akulturasi dan pemberdayaan siswa sepanjang hidupnya, pendidikan sekolah hendaknya dikembangkan sebagai alat sosial. Dengan memberikan keteladanan, memperkuat kemauan siswa dan mengembangkan kreativitas dalam proses

pembelajaran, serta melalui adanya pendidikan kewarganegaraan, sekolah harus menjadi pusat pengembangan sikap berwawasan luas, kecakapan hidup dan kehidupan demokratis untuk membangun kehidupan.

Karena ciri utama negara cerdas adalah mempunyai komitmen terhadap pemeliharaan dan pembangunan yang konsisten atau berkesinambungan, mau dan mampu memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan perkembangan zaman dan melaksanakannya secara efektif dan Menangani secara berkelanjutan krisis-krisis yang selalu timbul demi kepentingan bangsa Indonesia, demi tercapainya kesejahteraan bangsa dan negara.

Jika hal ini disajikan dalam bentuk program pendidikan, maka proses belajar dan pembelajaran guru harus memberikan perhatian khusus dan usaha yang besar sampai-sampai tidak belajar dengan mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus meningkatkan kualitas sumber daya pendidikannya guna mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang akan memudahkan siswa untuk menikmati cita-cita demokrasi yang sesungguhnya. Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendidikan memungkinkan siswa untuk belajar tentang sejarah demokrasi di negaranya sejak zaman dahulu. Untuk itu kita para calon guru juga harus meningkatkan kualitas pengajaran kita agar dapat mendidik peserta didik yang berjiwa nasionalis dan bersikap demokratis.

BAB II

PKN SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER

A. Landasan PKN

UUD 1945 sebagai landasan konstitusi menetapkan tujuan bernegara pada alinea keempat pembukaannya. Salah satu tujuan negara dapat dirumuskan dalam pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Jika dicermati, ketiga kata tersebut mengandung makna yang cukup mendalam. Kehidupan Cerdas Bangsa menyampaikan pesan betapa pentingnya pendidikan bagi seluruh anak di tanah air.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pernyataan ini menyampaikan pesan kepada penyelenggara negara dan seluruh rakyat bahwa mereka harus mempunyai kemampuan berpikir, bertindak dan berperilaku serta cerdas baik dalam penyelesaian masalah maupun pengambilan keputusan di tingkat negara, nasional, dan sosial. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional dan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya pada pasal 37 ayat (1) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: “.....b. pendidikan kewarganegaraan;...” dan pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:... “b. pendidikan kewarganegaraan....”. sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Keutuhan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di negeri ini. Arah pembangunan hendaknya bertujuan untuk mendidik pelajar Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Arah pengembangan pendidikan nasional pada era reformasi mengacu pada UU Sisdiknas yang dioperasionalkan dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP). Sesuai kebijakan otonomi pendidikan, pemerintah pusat tidak lagi bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum sekolah, melainkan diserahkan kepada

masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional hanya memberikan standar nasional berupa standar materi dan standar kinerja lulusan. Sementara itu, penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan menurut jenjang dan jenisnya. Sebagai landasan kurikulumnya, pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendiknas Nomor 20 dan 21 Tahun 2016 masing-masing tentang SI dan SKL.

Pemberlakuan peraturan tentang otonomi pendidikan mempunyai konsekuensi bagi setiap lembaga pendidikan, termasuk dalam pengembangan program, karena jika mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pembuatan program dan pengelolaan bidang lain, maka sebaliknya ia berkewajiban untuk senantiasa menjaga otonomi pendidikan. meningkatkan kualitas meningkatkan pengajaran. Satuan pendidikan. sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku.

B. Karakter Bangsa Indonesia

Karakter adalah watak, watak, akhlak, atau kepribadian seseorang, yang berkembang melalui internalisasi berbagai keutamaan (virtue) yang diyakini mendasari cara seseorang memandang, berpikir, berperilaku dan bertindak. Rahmatiani (2017) menyatakan kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada

orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa Wynne (Zuchdi, 2015), mengatakan bahwa ada dua pengertian tentang karakter.

Kesatu, karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk atau berkarakter buruk. Sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan “personality”. Seseorang baru bisa disebut “orang berkarakter” apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral (Zuchdi, 2015).

Sejalan dengan hal tersebut Lickona (Lickona, 2013) menyebut pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “knowing the good”, tetapi juga “desiring the good” atau “loving the good” dan “acting the good”. Suyanto (2011) mengemukakan, karakter adalah sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Selaras dengan Suyanto, Hasanah (2012) mengatakan bahwasannya karakter bangsa dibangun dari nilai etika inti (core ethical values) yang bersumber dari nilai-nilai agama, falsafah negara dan budaya. Nilai yang bersumber dari budaya bangsa amat banyak dan beragam serta mengandung nilai luhur bangsa yang dapat menjadikan bangsa ini memiliki modal sosial yang

tangguh untuk membangun peradaban unggul. Relevansi secara umum mengenai karakter dapat dikatakan sebagai pola pikir dan pola perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu, dalam pergaulan kehidupan baik lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Nilai-nilai karakter merupakan aspek yang terwujud dalam diri setiap orang dan wajib diterapkan dalam setiap tindakan manusia sesuai model hidupnya. Revolusi memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan pendidikan karakter dan mendukung pengembangan karakter generasi muda dalam revolusi mental yang memajukan program pendidikan karakter. Pembangunan nasional.

Kementerian Pendidikan Nasional (2010) telah mengidentifikasi mengidentifikasi 18 nilai-nilai karakter bangsa dalam pendidikan karakter, yaitu:

1. Religius, Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur, Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi, Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
6. Kreatif, Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri, Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis, Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan, Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air, Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
12. Menghargai Prestasi, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/Komunikatif, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14. Cinta Damai, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
15. Gemar Membaca, Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial, Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab, Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Orang Indonesia yang kuat adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Karakter religius, ditandai dengan sikap hidup dan kepribadian yang bertakwa dalam beribadah, jujur, amanah, dermawan, mudah bergaul dan toleran. Karakter moderat, ditandai dengan sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian perantara antara individu dan masyarakat, berorientasi material dan spiritual serta mampu hidup dan bekerjasama dalam keberagaman.

Sifat cerdas, dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Sikap mandiri, dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsabangsa (Juliardi, 2015). Karakter dimaknai sebagai nilai terpenting yang melekat pada diri setiap orang sebagai warga negara, yang kemudian menjelma menjadi kepribadian dan faktor penentu jati diri kolektif bangsa. Dalam konteks berbangsa, karakter berfungsi sebagai kekuatan identitas dan kekuatan mental yang mendorong suatu bangsa mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan dengan menampilkan keunggulan kompetitif, komparatif, dan dinamis dibandingkan bangsa lain.

C. PKn Sebagai Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan karakter bangsa yang diinginkan melalui proses kewarganegaraan sekaligus mendokumentasikan secara memadai pembelajaran yang diperoleh siswa sehingga harapan baru bagi pembangunan bangsa dapat terwujud. Pada dasarnya pengajaran PKn berbeda dengan metode pengajaran lainnya yang memerlukan ketelitian karena pengajaran PKn lebih terfokus pada masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan. Gagasan pokok pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik warga negara yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan, yaitu warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakhlak mulia, berilmu dan mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Ciri-ciri ilmu-ilmu sosial hendaknya sesuai dengan gagasan dasar bidang-bidang ilmu-ilmu sosial, yang tujuannya adalah untuk mendidik warga negara yang ideal, yaitu warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berilmu, keterampilan dan nilai. sesuai dengan prinsip kewarganegaraan.

Pendidikan merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk membentuk sistem nilai yang ada dalam diri seseorang terkait dengan terwujudnya harkat dan martabat manusia sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat sekitarnya.

Pendidikan senantiasa mengarahkan upaya dalam peningkatan kesadaran, harkat dan martabat seseorang baik secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Sejalan dengan hal tersebut, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Dalam konteks ini, salah satu tujuan pendidikan karakter adalah pendidikan politik. Kewarganegaraan telah menjadi bagian integral dari perangkat pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui koridor “pendidikan berbasis nilai”. Tujuan

pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, berkemampuan, berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kewarganegaraan menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Pendidikan kewarganegaraan memungkinkan warga negara membuat pilihan yang bijaksana dan terinformasi di antara berbagai alternatif yang ditawarkan dan membekali mereka dengan pengalaman dan pengetahuan yang dapat mendorong berkembangnya komitmen tulus terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memungkinkan kelangsungan hidup masyarakat bebas.

Jika bidang PKn menjadi objek kajiannya, maka sebenarnya objek kajian ideologi kewarganegaraan yang sangat penting adalah perilaku warga negara. Budaya kewarganegaraan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan warga negara yang cerdas, kompeten, dan berkarakter, serta setia kepada bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang penting dalam pengembangan karakter. Oleh karena itu, tujuan pengembangan karakter ditetapkan dalam pembelajaran PKn. Salah satu cara yang tepat untuk merevitalisasi pendidikan karakter adalah pendidikan kewarganegaraan dalam artian nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter diimplementasikan dalam pendidikan kewarganegaraan melalui proses integrasi. Integrasi